

Hibbani, M., Sampurna, A. F. Penulis Pertama (Nama Akhir/Keluarga), (Nama Pemberian); Penulis Kedua (Nama Akhir/Keluarga), (Nama Pemberian); dst. (2026). Transparansi Digital Sebagai Instrumen Penguatan Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020-2024. Title of Manuscript, *Prediksi*, Vol. 25 (2) 346-358. *Prediksi*, Vol. 25 (2) pp. x-x.

Transparansi Digital Sebagai Instrumen Penguatan Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020-2024

Muhammad Hibbani^{1*}, Agung Firman Sampurna²

^{1,2}. *Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia*

Email: ¹muhammad.hibbani@ui.ac.id, ²agung.firman@ui.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

[25 Mei 2026dd/mm/yyyy](#)

Received in revised form:

[23 Juni 2026dd/mm/yyyy](#)

Accepted:

[17 Juli 2026dd/mm/yyyy](#)

Keyword:

Digital transparency; local government; public accountability; public sector governance; SPBE

Kata Kunci:

Akuntabilitas publik; pemerintahan digital; pemerintah daerah; SPBE; transparansi digital.

ABSTRACT

Digital transparency has increasingly been recognized as an important instrument for strengthening public accountability in the era of digital government. However, previous studies have shown that the disclosure of information through digital platforms does not automatically lead to improved accountability. This study aims to analyze how digital transparency functions as an instrument for strengthening public accountability in the Surabaya City Government during the 2020–2024 period. A descriptive qualitative approach was employed using content analysis of seven official digital platforms managed by the Surabaya City Government, including the municipal government portal, the Public Information and Documentation Management Officer (PPID) portal, Open Data Surabaya, the Electronic Procurement Service (LPSE), SP4N-LAPOR!, Suroboyo Hub, and other public information service platforms. The analysis was complemented by a comparison of national Electronic-Based Government System (SPBE) index data and external accountability indicators. The findings reveal that all digital transparency indicators were available and functioned substantively rather than merely fulfilling administrative requirements. Digital transparency contributed to strengthening public accountability through accessible information, disclosure of public documents, integrated information systems, and responsive and traceable complaint-handling mechanisms. Throughout the study period, Surabaya consistently achieved SPBE scores above the national average, reaching 4.49 in 2024. The study also identified five supporting factors: committed leadership, system integration, user orientation, institutional capacity, and effective complaint follow-up mechanisms. These findings suggest that digital transparency can strengthen public accountability when supported by adequate institutional capacity and citizen-oriented information governance.

ABSTRAK

Transparansi digital semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas publik di era pemerintahan berbasis elektronik. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi melalui platform digital tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transparansi digital dalam penguatan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten terhadap tujuh kanal digital resmi Pemerintah Kota Surabaya, meliputi portal pemerintah daerah, PPID, Open Data, LPSE, SP4N-LAPOR!, Suroboyo Hub, dan platform layanan informasi publik lainnya. Analisis diperkuat melalui komparasi data indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional serta indikator akuntabilitas eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator transparansi digital telah tersedia dan berfungsi secara substantif, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif. Transparansi digital berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas publik melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, keterbukaan dokumen publik, integrasi sistem informasi, serta mekanisme pengaduan yang responsif dan dapat ditelusuri. Selama periode penelitian, nilai SPBE Kota Surabaya konsisten berada di atas rata-rata nasional dan mencapai skor 4,49 pada tahun 2024. Penelitian ini juga mengidentifikasi lima faktor pendukung efektivitas transparansi digital, yaitu kepemimpinan yang berkomitmen, integrasi sistem, orientasi pengguna, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme tindak lanjut pengaduan. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi digital dapat memperkuat akuntabilitas publik apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola informasi yang memadai.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license

* Corresponding author: muhammad.hibbani@ui.ac.id

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis ([Mukarromah & Hayat, 2024](#)). Dalam perspektif administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses, keputusan, dan hasil penyelenggaraan pemerintahan. Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan di mana aktor publik berkewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta penjelasan dan memberikan penilaian ([Sawir, 2022](#)). Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas menjadi semakin penting karena pemerintah berada pada level yang paling dekat dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Meskipun demikian, penguatan akuntabilitas publik sering menghadapi hambatan berupa asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat ([Pasae, 2025](#)). Pemerintah memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap data, dokumen, dan informasi kebijakan dibandingkan warga negara. Ketika informasi publik tidak tersedia secara memadai, masyarakat mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan, mengevaluasi kinerja pemerintah, maupun mengajukan koreksi terhadap kebijakan yang dijalankan. Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mengurangi efektivitas mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi lokal.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mengatasi persoalan tersebut. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah memproduksi, mengelola, dan menyebarluaskan informasi kepada publik ([Heriyanto, 2022](#)). Jika pada masa lalu akses terhadap dokumen pemerintah memerlukan prosedur birokratis yang panjang, kini berbagai informasi publik dapat diakses secara daring melalui website resmi, portal data terbuka, media sosial pemerintah, sistem pengaduan elektronik, dan berbagai platform layanan digital lainnya ([Amelia & Hidajat, 2025](#)). Perubahan ini tidak hanya menghadirkan efisiensi administratif, tetapi juga mengubah ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, transparansi digital muncul sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas publik ([Matheus et al., 2023](#)). Transparansi dalam pemerintahan tidak sekadar berarti membuka akses terhadap informasi, melainkan menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan, memahami informasi tersebut, serta menggunakannya untuk menilai dan mengawasi tindakan pemerintah. Hood (2010) menjelaskan bahwa transparansi merupakan kondisi ketika informasi tersedia secara terbuka sehingga pihak eksternal dapat mengamati, mengevaluasi, dan memverifikasi tindakan organisasi publik ([Iwan Ahmad Puji Santoso, 2025](#)). Di era digital, transparansi diwujudkan melalui berbagai medium teknologi seperti website pemerintah, portal data terbuka, dashboard kinerja, sistem pengadaan elektronik, dan kanal pengaduan daring ([Bertot et al., 2010](#)) ([Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010](#)).

Namun demikian, transparansi digital tidak identik dengan akuntabilitas publik. Hubungan antara keduanya bersifat kompleks dan tidak selalu linier. [Halachmi & Greiling \(2013\)](#) menunjukkan bahwa implementasi *e-government* tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan akuntabilitas. Banyak organisasi publik berhasil membangun platform digital dan menyediakan informasi secara daring, tetapi gagal menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. [Meijer & Bolívar \(2016\)](#) Meijer

(2013) menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar persoalan membuka dokumen, melainkan berkaitan dengan kemampuan informasi tersebut untuk dipahami, dimanfaatkan, dan dijadikan dasar pengawasan oleh masyarakat. Dengan kata lain, transparansi merupakan syarat penting bagi akuntabilitas, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

Hubungan tersebut juga diperkuat oleh temuan [Grimmelikhuijsen et al., \(2012\)](#) [Cucciniello, Porumbescu, dan Grimmelikhuijsen \(2017\)](#) yang merangkum lebih dari dua dekade penelitian tentang transparansi pemerintahan. Mereka menemukan bahwa dampak transparansi terhadap akuntabilitas dan kepercayaan publik sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersedia, kapasitas pengguna dalam memanfaatkan informasi tersebut, serta konteks kelembagaan yang mendukungnya. Transparansi dapat menghasilkan akuntabilitas apabila informasi yang dibuka bersifat relevan, mudah dipahami, mutakhir, dan disertai mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik kepada pemerintah.

Perspektif serupa dikemukakan oleh Welch, Hinnant, dan Moon (2005) yang menyoroti pentingnya pengalaman pengguna dalam implementasi *e-government* [\(Wirawan, 2020\)](#). Menurut mereka, keberhasilan layanan digital pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemudahan akses, kualitas informasi, dan responsivitas pemerintah terhadap interaksi yang terjadi [\(Wirawan, 2020\)](#). Oleh karena itu, transparansi digital yang efektif harus dipahami sebagai kombinasi antara keterbukaan informasi dan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara nyata.

Perkembangan transparansi digital tidak dapat dilepaskan dari agenda transformasi digital sektor publik yang lebih luas. [Mergel et al., \(2019\)](#) [Mergel, Edelman, dan Haug \(2019\)](#) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan bukan sekadar proses digitalisasi dokumen atau layanan, melainkan perubahan menyeluruh terhadap cara organisasi publik bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengelola informasi. [Nurhikmahyanti et al., \(2024\)](#) [Brennen dan Kreiss \(2016\)](#) membedakan digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital sebagai tiga tahapan yang berbeda. Pada tahap digitasi, dokumen fisik diubah menjadi format digital. Pada tahap digitalisasi, teknologi mulai mengubah proses kerja organisasi. Sementara itu, transformasi digital terjadi ketika teknologi mendorong perubahan mendasar pada struktur, budaya, dan tata kelola organisasi.

Dalam konteks Indonesia, agenda transformasi digital pemerintahan memperoleh landasan yang kuat melalui berbagai kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik [\(Mukarromah & Hayat, 2024\)](#). Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka utama pengembangan pemerintahan digital di Indonesia. Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas, integrasi, dan keterbukaan data pemerintahan.

Melalui SPBE [Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik \(SPBE\)](#), pemerintah berupaya mendorong integrasi layanan digital, efisiensi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik [\(Kementerian PAN-RB, 2023\)](#). Evaluasi SPBE yang dilakukan secara nasional menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam implementasi pemerintahan digital. Namun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan kesenjangan antarinstansi dan antar daerah. Sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada tingkat kematangan digital yang sedang, sementara hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai kategori tertinggi dalam evaluasi SPBE.

[Mahayani \(2024\)](#) [Literatur e-government](#) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas organisasi dan keterlibatan masyarakat. [Harahap et al., \(2023\)](#) [Tolbert dan Mossberger \(2006\)](#) menemukan bahwa *e-government* dapat meningkatkan kepercayaan publik ketika masyarakat benar-benar

merasakan manfaatnya. [Myeong et al., \(2021\)](#) ~~Kim dan Lee (2012)~~ menambahkan bahwa keterbukaan informasi, partisipasi digital, dan responsivitas pemerintah harus berjalan secara bersamaan untuk menghasilkan tata kelola yang lebih akuntabel. Temuan ini sejalan dengan [Porumbescu \(2015\)](#) ~~Porumbescu (2015)~~ yang menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap permintaan informasi dan pengaduan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membangun kepercayaan publik.

Perkembangan konsep open government semakin memperkuat pentingnya transparansi digital dalam tata kelola pemerintahan. [Wirtz et al., \(2019\)](#) ~~Wirtz, Weyerer, dan Rösch (2019)~~ menjelaskan bahwa keterbukaan pemerintahan hanya akan efektif apabila informasi yang tersedia dipercaya, mudah diakses, dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. [A. J. Meijer et al., \(2012\)](#) ~~Meijer, Curtin, dan Hillebrandt (2012)~~ membedakan dua dimensi utama keterbukaan pemerintahan, yaitu *vision* dan *voice*. *Vision* berkaitan dengan kemampuan masyarakat melihat dan memahami tindakan pemerintah, sedangkan *voice* berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan koreksi terhadap kebijakan publik. Kedua dimensi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun akuntabilitas publik di era digital.

Lebih lanjut, [Linders \(2012\)](#) ~~Linders (2012)~~ memperkenalkan konsep *government as a platform* yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam perspektif ini, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah ([Ndibaj et al., 2024](#)). Namun demikian, ~~Karkin dan Cezar (2024)~~ [Karkin & Cezar \(2024\)](#) mengingatkan bahwa partisipasi digital tidak akan menghasilkan nilai publik apabila tidak diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan responsif dari pemerintah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas transparansi digital, *e-government*, dan akuntabilitas publik, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi implementasi teknologi atau capaian SPBE tanpa menjelaskan bagaimana transparansi digital berfungsi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik. Kedua, penelitian mengenai hubungan antara transparansi digital dan akuntabilitas publik pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia masih relatif terbatas. Ketiga, masih sedikit penelitian yang mengombinasikan analisis terhadap fitur transparansi digital, capaian pemerintahan digital, dan indikator akuntabilitas eksternal dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Kota Surabaya merupakan kasus yang relevan untuk menjawab kesenjangan tersebut. Sebagai salah satu pemerintah daerah dengan capaian SPBE tertinggi di Indonesia serta berbagai penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik, Surabaya menunjukkan karakteristik yang menarik untuk diteliti. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam membangun infrastruktur digital, tetapi juga membuka peluang untuk memahami bagaimana transparansi digital dapat digunakan sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik dalam praktik pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana transparansi digital berfungsi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai hubungan antara transparansi digital dan akuntabilitas publik, sekaligus memberikan pembelajaran praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.

Formatted: Font: Italic

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten (*content analysis*) untuk menganalisis transparansi digital sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengevaluasi ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan informasi publik yang disajikan melalui berbagai kanal digital pemerintah (Pasolong, 2020).

Objek penelitian meliputi tujuh kanal digital resmi Pemerintah Kota Surabaya, yaitu portal surabaya.go.id, PPID, laman Dinas Komunikasi dan Informatika, Suroboyo Hub, SP4N-LAPOR!, Open Data Surabaya, dan LPSE. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi daring dan penelusuran dokumen pada Juni 2025 dengan cakupan data periode 2020–2024. Periode tersebut dipilih karena merepresentasikan percepatan transformasi digital sektor publik pascapandemi sekaligus mencerminkan satu periode kepemimpinan daerah yang relatif utuh.

Instrumen penelitian berupa daftar periksa (checklist) yang disusun berdasarkan sintesis indikator transparansi digital Grimmeliikhuijsen dan Welch (2012), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta indikator terkait dalam evaluasi SPBE. Sebanyak 12 indikator digunakan untuk menilai ketersediaan, kelengkapan, kemutakhiran, dan kemudahan akses informasi publik pada setiap kanal digital.

Data sekunder diperoleh dari laporan Evaluasi SPBE Nasional 2020–2024, laporan Keterbukaan Informasi Publik, serta berbagai dokumen resmi Pemerintah Kota Surabaya. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu inventarisasi fitur transparansi digital, evaluasi kualitas informasi publik, dan kontekstualisasi temuan melalui perbandingan dengan capaian nasional. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi terhadap berbagai dokumen dan laporan resmi yang relevan.

HASIL PENELITIAN

Transparansi Digital pada Pemerintah Kota Surabaya

Hasil analisis konten terhadap tujuh kanal digital resmi Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa seluruh indikator transparansi digital yang digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi. Dua belas indikator yang dianalisis mencakup keberadaan website resmi pemerintah daerah, portal PPID, publikasi dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, laporan kinerja instansi pemerintah, informasi pengadaan barang dan jasa, dashboard layanan publik, kanal pengaduan masyarakat, media sosial resmi pemerintah, portal open data, standar pelayanan publik, dan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit.

Tabel 1 Evaluasi Transparansi Digital Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Indikator Transparansi Digital	Ketersediaan	Kualitas Informasi	Temuan Utama
1	Website resmi pemerintah daerah	Tersedia	Tinggi	Aktif, responsif, dan diperbarui secara berkala
2	Portal PPID	Tersedia	Tinggi	Menyediakan dokumen informasi publik secara lengkap
3	Publikasi APBD	Tersedia	Tinggi	Dokumen anggaran dapat diakses dan diunduh publik

4	Laporan Realisasi Anggaran	Tersedia	Tinggi	Informasi realisasi tersedia melalui PPID
5	LKjIP/Laporan Kinerja	Tersedia	Tinggi	Mendukung keterlacakan capaian kinerja pemerintah
6	Informasi Pengadaan (LPSE)	Tersedia	Tinggi	Terintegrasi dengan sistem pengadaan nasional
7	Dashboard kinerja dan layanan publik	Tersedia	Tinggi	Menyediakan pemantauan kinerja secara real-time
8	Kanal pengaduan masyarakat	Tersedia	Tinggi	Terhubung dengan SP4N-LAPOR! dan Suroboyo Hub
9	Media sosial pemerintah	Tersedia	Tinggi	Digunakan sebagai sarana komunikasi dan respons publik
10	Open Data Surabaya	Tersedia	Tinggi	Menyediakan berbagai dataset publik yang dapat diakses masyarakat
11	Informasi standar pelayanan publik	Tersedia	Tinggi	Tersedia pada masing-masing perangkat daerah
12	Laporan keuangan yang diaudit	Tersedia	Tinggi	Didukung opini WTP secara konsisten

Sumber: surabaya.go.id

Temuan menunjukkan bahwa seluruh kanal digital tersebut tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga berfungsi secara aktif melalui pembaruan informasi yang relatif rutin, akses publik yang terbuka, dan ketersediaan dokumen yang dapat diunduh serta digunakan kembali oleh masyarakat. Selain itu, berbagai platform digital yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan tingkat integrasi yang cukup tinggi sehingga memungkinkan keterhubungan antara sistem informasi pelayanan, pengaduan masyarakat, keterbukaan informasi, dan pengelolaan data publik.

Posisi Transparansi Digital Surabaya dalam Konteks Nasional

Perbandingan data SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten memperoleh nilai di atas rata-rata nasional selama periode 2020–2024. Nilai SPBE Surabaya meningkat dari 3,42 pada tahun 2020 menjadi 4,49 pada tahun 2024. Pada saat yang sama, rata-rata nasional meningkat dari 2,00 menjadi 3,12.

Tabel 2 Perbandingan Capaian SPBE Kota Surabaya dan Rata-rata Nasional Tahun 2020–2024

Tahun	SPBE Nasional	Kategori Nasional	SPBE Kota Surabaya	Kategori Surabaya	Selisih
2020	2,00	Cukup	3,42	Baik	+1,42
2021	2,24	Cukup	3,60	Baik	+1,36
2022	2,34	Cukup	4,10	Sangat Baik	+1,76
2023	2,70	Baik	4,38	Memuaskan	+1,68
2024	3,12	Baik	4,49	Memuaskan	+1,37

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Sumber: Kementerian PANRB (2021–2025), diolah penulis.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai SPBE Kota Surabaya secara konsisten berada di atas rata-rata nasional sepanjang periode 2020–2024. Skor SPBE Surabaya meningkat dari 3,42 pada tahun 2020 menjadi 4,49 pada tahun 2024, sedangkan rata-rata nasional meningkat dari 2,00 menjadi 3,12 pada periode yang sama. Selisih capaian antara Surabaya dan rata-rata nasional berkisar antara 1,36 hingga 1,76 poin. Selain menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja pemerintahan digital, temuan ini mengindikasikan bahwa Surabaya mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu pemerintah daerah dengan tingkat kematangan SPBE tertinggi di Indonesia.

Bukti Empiris Penguatan Akuntabilitas Publik

Selain capaian SPBE, efektivitas transparansi digital Pemerintah Kota Surabaya juga memperoleh pengakuan dari berbagai lembaga eksternal. Selama periode penelitian, Surabaya secara konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi, penghargaan *Smart Government* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, predikat SPBE terbaik nasional pada tahun 2024, serta penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025. Berbagai rekognisi tersebut menunjukkan bahwa praktik transparansi digital Surabaya tidak hanya diakui secara internal, tetapi juga memperoleh validasi dari lembaga independen yang memiliki mandat melakukan evaluasi terhadap keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan.

Formatted: Font: Italic

Temuan ini memperkuat hasil analisis sebelumnya bahwa transparansi digital di Surabaya telah berkembang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang relatif matang. Meskipun penghargaan dan rekognisi tidak dapat digunakan sebagai ukuran tunggal akuntabilitas publik, keberadaannya memberikan indikasi bahwa berbagai mekanisme transparansi yang dibangun memperoleh pengakuan eksternal yang konsisten dalam periode yang cukup panjang.

PEMBAHASAN

Transparansi Digital sebagai Instrumen Penguatan Akuntabilitas Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi digital pada Pemerintah Kota Surabaya tidak berhenti pada penyediaan informasi secara daring, tetapi berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat akuntabilitas publik. Hal ini terlihat dari keterbukaan dokumen publik, kemudahan akses informasi, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini mendukung pandangan Bovens (2007) bahwa akuntabilitas mensyaratkan adanya akses terhadap informasi yang memungkinkan pihak eksternal melakukan evaluasi terhadap tindakan pemerintah (Fadli Mappisabbi et al., 2025). Dalam konteks Surabaya, transparansi digital menyediakan infrastruktur informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai anggaran, kinerja, pengadaan, dan layanan publik secara lebih mudah dibandingkan mekanisme konvensional.

Formatted: Right

Hubungan Transparansi Digital dan Akuntabilitas Publik

Meskipun seluruh indikator transparansi digital terpenuhi, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas transparansi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan platform digital. Temuan ini memperkuat argumen Halachmi dan Greiling (2013) serta Meijer (2013) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang kompleks dan tidak bersifat otomatis (Amelia & Hidajat, 2025).

Kasus Surabaya menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menghasilkan nilai akuntabilitas karena didukung oleh mekanisme kelembagaan yang memungkinkan informasi digunakan untuk pengawasan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, transparansi digital harus dipahami sebagai prasyarat penting bagi akuntabilitas, bukan sebagai jaminan otomatis terwujudnya akuntabilitas publik.

Faktor Kelembagaan yang Menopang Efektivitas Transparansi Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas transparansi digital di Pemerintah Kota Surabaya tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau keberadaan berbagai platform digital. Transparansi digital yang mampu berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas publik justru ditopang oleh sejumlah faktor kelembagaan yang memungkinkan informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima faktor utama yang berperan dalam menopang efektivitas transparansi digital di Kota Surabaya.

Faktor pertama adalah kepemimpinan yang berkomitmen terhadap keterbukaan informasi. Berbagai kanal digital yang tersedia menunjukkan adanya konsistensi kebijakan dalam menempatkan transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut tercermin dari keberlanjutan pengelolaan portal informasi publik, pembaruan data secara berkala, serta integrasi berbagai layanan digital yang tetap dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mergel, Edelman, dan Haug (2019) yang menegaskan bahwa transformasi digital sektor publik membutuhkan dukungan kepemimpinan yang mampu menginternalisasikan nilai keterbukaan dan inovasi ke dalam budaya organisasi. Tanpa komitmen kepemimpinan, digitalisasi sering kali berhenti pada pembangunan sistem tanpa keberlanjutan pengelolaan.

Faktor kedua adalah integrasi sistem digital antarorganisasi perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai platform digital Pemerintah Kota Surabaya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung melalui ekosistem informasi yang relatif terintegrasi. Integrasi tersebut memungkinkan data dan informasi publik dapat diakses melalui berbagai kanal yang saling melengkapi, sehingga mengurangi fragmentasi informasi yang sering menjadi kendala dalam pemerintahan digital. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa transparansi digital yang efektif memerlukan koordinasi lintas organisasi dan tata kelola data yang baik agar informasi yang disajikan tetap konsisten, mutakhir, dan mudah ditelusuri oleh masyarakat.

Faktor ketiga adalah orientasi layanan yang berpusat pada pengguna (*user-centered orientation*). Transparansi digital tidak hanya berkaitan dengan jumlah informasi yang dipublikasikan, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai platform digital Surabaya dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna melalui tampilan yang relatif sederhana, navigasi yang mudah digunakan, serta penyediaan layanan yang dapat diakses secara daring. Temuan ini mendukung penelitian Welch, Hinnant, dan Moon (2005) yang menunjukkan bahwa keberhasilan *e-government* sangat dipengaruhi oleh pengalaman pengguna dalam mengakses informasi dan layanan publik (Pujiastuti & Sumarni, 2023). Informasi yang lengkap tetapi sulit ditemukan atau dipahami pada akhirnya tidak akan

menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Faktor keempat adalah kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai. Pengelolaan transparansi digital membutuhkan dukungan organisasi yang mampu menjaga kualitas informasi, melakukan pembaruan data secara berkala, serta memastikan keberlangsungan berbagai platform digital yang digunakan. Konsistensi ketersediaan informasi publik selama periode penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki kapasitas kelembagaan yang relatif baik dalam mengelola ekosistem transparansi digital. Temuan ini sejalan dengan SofyaniSofyani, Riyadh, dan Fahlevi (2020) yang menemukan bahwa tata kelola teknologi informasi yang baik berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Sofyani et al., 2020).

Faktor kelima adalah keberadaan mekanisme pengaduan yang responsif dan dapat ditelusuri. Penelitian menemukan bahwa transparansi digital di Surabaya tidak berhenti pada penyediaan informasi satu arah, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengaduan melalui berbagai kanal digital. Lebih penting lagi, mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat memantau tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terhadap laporan yang disampaikan. Temuan ini memperkuat argumen Porumbescu (2015) bahwa responsivitas pemerintah terhadap permintaan informasi dan pengaduan publik merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam membangun akuntabilitas publik. Transparansi akan memiliki nilai yang lebih besar ketika disertai dengan kemampuan pemerintah untuk merespons umpan balik masyarakat secara nyata (Andriwiguna et al., 2026).

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas transparansi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan pada kapasitas kelembagaan yang menopang pemanfaatan teknologi tersebut. Dengan demikian, transparansi digital dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas publik apabila didukung oleh kepemimpinan yang konsisten, integrasi sistem yang baik, orientasi pada pengguna, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan mekanisme respons publik yang efektif. Temuan ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan pada akhirnya merupakan persoalan tata kelola kelembagaan, bukan semata persoalan teknologi.

Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi pengembangan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa transparansi digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarluaskan data dan dokumen pemerintah. Transparansi digital merupakan bagian dari mekanisme tata kelola yang berfungsi memperkuat akuntabilitas publik melalui peningkatan akses informasi, keterlacakan kinerja, dan perluasan ruang pengawasan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi atau platform yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Kedua, hasil penelitian mengindikasikan bahwa investasi teknologi tanpa penguatan kapasitas kelembagaan berpotensi menghasilkan transparansi yang bersifat administratif dan simbolik. Berbagai pemerintah daerah di Indonesia telah mengembangkan portal informasi, sistem pengaduan, maupun layanan digital, namun tidak seluruhnya berhasil meningkatkan akuntabilitas publik. Pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa efektivitas transparansi digital memerlukan dukungan kepemimpinan yang berkomitmen, integrasi sistem informasi, kapasitas organisasi yang memadai, serta mekanisme tindak lanjut yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan transparansi digital lebih ditentukan oleh

kualitas tata kelola kelembagaan dibandingkan oleh kecanggihan teknologi semata.

Ketiga, penelitian ini memperlihatkan bahwa transparansi digital berpotensi memperkuat mekanisme checks and balances pada tingkat daerah. Ketersediaan informasi mengenai anggaran, kinerja program, pengadaan barang dan jasa, serta layanan publik memungkinkan berbagai aktor pengawasan, termasuk DPRD, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan warga negara, memperoleh akses informasi yang lebih luas dan setara. Kondisi tersebut dapat mengurangi asimetri informasi yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin terbuka akses terhadap informasi publik, semakin besar pula peluang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan sumber daya publik.

Keempat, temuan penelitian menegaskan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pengguna (*user-centered governance*) dalam pengembangan pemerintahan digital. Transparansi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan platform digital pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek kemudahan akses, keterbacaan informasi, dan responsivitas layanan agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Secara lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi digital dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel. Pengalaman Kota Surabaya memberikan pelajaran bahwa transformasi digital yang berhasil tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem kelembagaan yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, agenda transformasi digital pemerintahan daerah perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya reformasi tata kelola dan penguatan akuntabilitas publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi digital berfungsi sebagai instrumen penting dalam penguatan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2020–2024. Transparansi digital tidak hanya diwujudkan melalui ketersediaan berbagai kanal informasi dan layanan publik berbasis digital, tetapi juga melalui kemampuannya menyediakan akses terhadap informasi pemerintahan, meningkatkan keterlacakan proses dan kinerja, serta membuka ruang pengawasan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, transparansi digital berkontribusi pada penguatan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Temuan penelitian menegaskan bahwa hubungan antara transparansi digital dan akuntabilitas publik tidak bersifat otomatis. Efektivitas transparansi digital bergantung pada dukungan faktor-faktor kelembagaan yang memungkinkan informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks Kota Surabaya, efektivitas tersebut ditopang oleh kepemimpinan yang berkomitmen terhadap keterbukaan informasi, integrasi sistem digital antarorganisasi perangkat daerah, orientasi pelayanan yang berpusat pada pengguna, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta mekanisme tindak lanjut pengaduan yang responsif dan dapat ditelusuri.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa transparansi digital merupakan prasyarat penting bagi akuntabilitas publik, tetapi tidak cukup tanpa dukungan tata kelola kelembagaan yang efektif. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan transparansi digital tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan oleh kemampuan institusi publik mengelola teknologi tersebut sebagai

bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus pemerintah daerah dan menggunakan pendekatan analisis konten terhadap kanal digital, termasuk keterbatasan yang lainnya berupa minimnya hasil wawancara dan data terkait yang secara eksplisit dapat meningkatkan validitas penelitian. Namun demikian, peneliti berharap, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan komparatif antar daerah atau mengombinasikan analisis digital dengan survei persepsi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara transparansi digital, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562–573. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699>
- Andriwiguna, A., Genedin, T., & Nugraha, B. (2026). Analisis Kebijakan Publik Dalam Penguatan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Era Desentralisasi. *PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 25(1), 11–17.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–273. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework¹. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Fadli Mappisabbi, Abd Haris, & Wahyudin Zuhri. (2025). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 174–184. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.2036>
- Grimmelikhuijsen, S. G., Welch, E. W., & Welch, E. W. (2012). Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-Mediated Transparency of Local Governments Published by : Wiley on behalf of the American Society for Public Administration Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/41506806> Developing and Testin. *Public Administration Review*, 72(4), 562–571.
- Halachmi, A., & Greiling, D. (2013). Transparency, E-government, and accountability: Some issues and considerations. *Public Performance and Management Review*, 36(4), 562–584. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360404>
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149–2160. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066–075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Karkin, N., & Cezar, A. (2024). The generation of public value through e-participation initiatives: A synthesis of the extant literature. *Government Information Quarterly*, 41(2), 101935. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101935>
- Kementerian PAN-RB. (2023). *Laporan Kinerja Reformasi Birokrasi dan SPBE 2023*.
- Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), 446–454. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003>
- Mahayani, N. M. H. (2024). Evaluasi Implementasi Smart City Di Indonesia: Tantangan Teknologi Dan Keberlanjutan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(4), 106–117.

Muhammad Hibbani, Agung Firman Sampurna Author, Author. (2026)-
Prediksi. Vol. 25 (2) 346-358Prediksi. Vol.u (v) pp. x-y.

- Matheus, R., Faber, R., Ismagilova, E., & Janssen, M. (2023). Digital transparency and the usefulness for open government. *International Journal of Information Management*, 73(December 2019), 102690. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/0020852311429533>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Mukarromah, N., & Hayat, A. P. S. E. L. (2024). Implimentasi Kebijakan e-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Humaniora*, 7(1), 17.
- Myeong, S., Kim, Y., & Ahn, M. J. (2021). Smart city strategies—Technology push or culture pull? A case study exploration of gimpo and Namyangju, South Korea. *Smart Cities*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.3390/smartcities4010003>
- Ndibau, P., Andayani, L., Sahriani, & Mursid. (2024). Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Digitalisasi Tahun 2024 di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *ABDIMAS DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.58839/jad.v5i2.1360>
- Nurhikmahyanti, D., Kurniawan, A. A., & Setiawati, R. (2024). Pendampingan Digitalisasi Sistem Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Website di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Abdimas Galuh*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.25157/ag.v6i1.12302>
- Pasae, S. L. P. S. Y. S. Y. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi ESDM Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 273–279.
- Pasolong, H. (2020). Metode Penelitian Administrasi Publik. In *Alfabeta*. Alfabeta. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Porumbescu, G. A. (2015). Using Transparency to Enhance Responsiveness and Trust in Local Government. *State and Local Government Review*, 47(3), 205–213. <https://doi.org/10.1177/0160323X15599427>
- Pujiastuti, N., & Sumarni, S. (2023). Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 22(3), 214. <https://doi.org/10.31293/pd.v22i3.7508>
- Sawir, M. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Publik: Konseptual dan Praktik*. Deepublish.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>

- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rösch, M. (2019). Open government and citizen participation: an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data. *International Review of Administrative Sciences*, 85(3), 566–586. <https://doi.org/10.1177/0020852317719996>

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, EndNote, atau Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang adalah sesuai dengan format APA style.

